



Tugas Berat untuk Haryadi-Hasto

■ Sultan Minta Kota Yogya Lebih Bersih

■ Turun Tangan Proyek Bandara Kulonprogo

YOGYA, TRIBUN - Tugas besar menanti para kepala daerah terpilih yang secara resmi dilantik Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Senin (22/5). Dalam sambutannya, Sultan meminta agar Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bisa melakukan penataan ruang dengan baik untuk representasi visualisasi keistimewaan DIY.

"Yogyakarta yang merepresentasikan visualisasi keistimewaan DIY, hendaknya memprioritaskan penataan ruang dan sistem transportasi kota beserta pengaturan dan penegakan hukum berikut kebersihan kotanya," terang Sri Sultan.

Selain itu, orang nomor satu di DIY itu menambahkan bahwa Yogyakarta harus siap menerima efek limpahan bandara baru dan tarikan *tourism booming* dari wilayah selatan DIY. "Tentang ini, Wali Kota dan Wakilnya tentu sudah paham tanpa saya merincinya," ucapnya.

Pelantikan dua kepala daerah di DIY itu berlangsung sekitar pukul 09.41. Proses pengambilan sumpah yang dipimpin Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan lantang ditirukan Bupati-Wakil Bupati Kulonprogo dan juga Walikota-Wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.



Yogyakarta harus siap menerima efek limpahan bandara baru dan tarikan *tourism booming* dari wilayah selatan DIY. Tentang ini, Wali Kota dan Wakilnya tentu sudah paham tanpa saya merincinya

Sri Sultan HB X, Gubernur DIY

Tugas Berat untuk Haryadi-Hasto

• Sambungan Hal 1

Seusai membacakan sumpah, masing-masing kepala daerah menandatangani berita acara pembacaan sumpah. "Saya percaya saudara-saudara bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan," ucap Sultan saat melantik keempatnya.

Seperti diketahui, dua pasangan kepala daerah DIY, baik Haryadi Suyuti yang menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta dan juga Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulonprogo merupakan petahana. Adapun yang dilantik sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta adalah Heroe Poerwadi serta Sutedjo sebagai Wakil Bupati Kulonprogo.

Magnet

Memiliki luasan dan keadaan geografis yang berbeda, Sultan mengatakan Yogyakarta dan Kulonprogo tentu memiliki sumberdaya yang berbeda. Walau demikian, keduanya tetap potensial untuk bisa dikembangkan

untuk meningkatkan kesejahteraan warganya masing-masing.

"Sekarang Kulonprogo ibarat magnet, karena dengan dibangunnya Bandara internasional baru banyak menarik investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan airport beserta *aerocity* dan *aeropolis* berikut peluang investasi ikutannya," bebernya.

Penguasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut menegaskan, kewajiban pemerintah kabupaten adalah memfasilitasi usahawan lokal DIY agar mampu menangkap peluang usaha baru yang tercipta dan menyiapkan tenaga kerja profesional agar juga mampu mengisi terbukanya kesempatan kerja baru yang memerlukan tingkat kompetensi terspesialisasi.

"Justru yang terpenting dalam akselerasi pembangunan bandara jangan seperti yang lalu. Tetapi kini bupati dan wakil bupati harus turun tangan untuk melanjutkan pembangunan relokasi hunian dan pendampingan pembebasan lahan," tandasnya.

Harus Selesai

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menuturkan setelah pelantikan tersebut pihaknya akan berlari untuk mempersiapkan kebutuhan bandara yang sudah sangat mendesak.

"Pak Presiden menargetkan 2019 harus mendarat pesawat di Kulonprogo dan sementara masih ada beberapa ganjalan," ucap Hasto.

Dua masalah yang harus diselesaikannya dalam waktu cepat tersebut, imbuhnya, adalah menyelesaikan akuisisi lahan yang tersisa dan juga mempercepat proses relokasi.

"Kalau akuisisi itu untuk pengambil alih lahan dari warga sekitar 200 bidang. Tapi tidak luas, itu kecil-kecil. Sekitar 50 KK yang memiliki. Akuisisi itu dalam 100 hari kerja ini harus selesai," tambahnya.

Terkait percepatan relokasi, Hasto mengatakan persiapan lahan dilakukan oleh Pemda DIY. Bagaimana caranya harus cari solusi agar pematangan lahan dipercepat. Orang-orang yang bertanggungjawab pada pekerjaannya tersebut, segera

dipanggil dan diharapkan usai pada 100 hari kerja.

Hal senada dikatakan usai pelantikan dan serah terima jabatan di halaman kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (22/5). "Kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan bandara dan penyelesaian berbagai persoalan yang masih ada," katanya.

Sementara itu, Pejabat Bupati Budi Antono menyampaikan selama dirinya bertugas, beberapa program pembangunan bisa dipungkaskan. Di antaranya terkait penyiapan lahan relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan ia akan segera berkonsolidasi menyelesaikan beberapa urusan di Yogyakarta. Misalnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, menciptakan Yogya bersih, Yogya tertib, dan Yogya aman. "Yogya bersih, Yogya tertib, Yogya aman. Itu jadi tagline kita dalam rangka menata Kota Yogya. Pemerintahan solid, kerjasama dan sebagainya," tandasnya. (kur/ais/ing/rid)

Hati-hati OTT dari KPK

JOGJA Corruption Watch (JCW) meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk tetap menjaga integritas selama menjalankan tugas yang dimulai Selasa (23/5) hari ini. Semangat antikorupsi untuk kesejahteraan warga pun harus selalu dipertanggung jawabkan.

"Janji-janji saat kampanye seharusnya segera dipenuhi. Janji memperbaiki kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi harus pula disertai de-

ngan semangat antikorupsi. Jangan pernah terbesit untuk melakukan korupsi," tegas Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Peradilan JCW, Senin (22/5).

● ke halaman 11

Hati-hati OTT dari KPK

● Sambungan Hal 1

Dia juga mengingatkan proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bukan berdasarkan atas tipuan, suka atau tidak suka,

serta balas budi saat kampanye dan bersih dari unsur KKN.

JCW mencontohkan kasus dugaan suap jabatan yang melibatkan bupati yang saat ini ditangani KPK bisa menjadi acuan agar tidak terjadi hal serupa. Pasalnya, kata dia, sangat mungkin terjadi di lingkungan Pemkot Yogyakarta, KPK melakukan OTT

(operasi tangkap tangan) karena suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

"Maka, proses transparan dan akuntabel dalam promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta sangat diperlukan," jelasnya.

Selain itu, JCW berharap Wali kota dan Wakil Wali kota Yogyakarta yang terpilih

untuk tidak rangkap jabatan. Hal ini karena potensi konflik kepentingan akan muncul jika seorang pejabat publik mau merangkap jabatan atau organisasi lain. "Rangkap jabatan sering dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, segelintir orang atau kelompoknya," ujarnya. (ais/kur/rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005